

PERAN TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN KAPAS DAN RAMI

Hasnam¹, Emy Sulistyowati², Nurheru², Sudjindro², dan Rr. Sri Hartati¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor

²Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang

RINGKASAN

Teknologi-teknologi sudah tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani kapas dan rami, adopsinya dapat ditingkatkan jika dilakukan pembinaan yang intensif, peningkatan pelayanan lembaga keuangan pedesaan, dan penguatan lembaga pendukung lainnya. Dengan status benih kapas dan rami yang masih bersifat barang publik, pengadaan benih seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk reformasi sistem perbenihan perlu dikembangkan suatu sistem yang melibatkan semua potensi nasional. Pengembangan kapas dan rami harus diintegrasikan dengan agro-industri dan penumbuhan industri hilirnya. Untuk itu perlu disusun rencana induk yang holistik; tanpa pengintegrasian tersebut usaha tani kapas dan rami tidak akan menarik petani, karena nilai produk primer yang semakin turun. Selain itu, perlu segera diambil langkah-langkah untuk implementasi UU no. 13/2005 dan Perpres no. 8/2005 untuk meningkatkan akses petani terhadap permodalan/dana. Perlu diambil langkah-langkah untuk mengefektifkan penyuluhan dengan meningkatkan mutu SDM, peran P4S, dan BPP; pertukaran aktivitas peneliti-penyuluh secara periodik diharapkan akan mempercepat proses alih-teknologi.

Kata kunci: kapas, rami, produktivitas, kelembagaan, agro-industri

KETERSEDIAAN DAN PERAN TEKNOLOGI

Peran teknologi dalam pengembangan kapas dan rami tentu akan menghadapi kondisi di lapangan saat ini, antara lain: (a) kesejahteraan petani yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dengan sistem usaha tani tradisional yang bersifat subsistem, (b) akses petani terhadap sumber daya produktif seperti permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas, dan (c) kurang berfungsinya lembaga petani dan lembaga pendukung lainnya di pedesaan. Dengan demikian teknologi yang dirakit harus disesuaikan; misalnya, karena kapas dialokasikan di daerah tadah hujan dengan kondisi marginal (*given*), maka varietas yang dirakit adalah varietas yang toleran terhadap keterbatasan air dan hujan yang eratik serta kebutuhan inputnya tidak terlalu tinggi. Inilah penyebab kega-

galan kapas hibrida yang diimpor dari India tahun 1980-an, karena kapas hibrida mensyaratkan ketersediaan air dan saprodi yang tinggi untuk mencapai hasil seperti yang dijanjikan.

Dengan pertimbangan teknis dan kondisi sosial seperti di atas, Badan Litbang Pertanian telah merakit teknologi kapas yang sebenarnya sederhana. Teknologi-teknologi tersebut adalah varietas unggul dan benih bermutu, rekomendasi waktu tanam di suatu wilayah berdasarkan hasil analisis peluang hujan, teknik konservasi air, pemupukan yang efisien, integrasi kapas dengan palawija dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara terpadu. Paket teknologi ini telah dicoba diterapkan di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2004 dan 2005 oleh Balittas bekerja sama dengan BPTP-BPTP dan Dinas Perkebunan setempat (program pengelolaan tanaman terpadu, PTT). Luas wilayah yang dibina

pada kedua tahun tersebut adalah 400 ha dan 164 ha.

Studi *participatory rural appraisal* (PRA) sebelum pelaksanaan PTT memang memunculkan masalah seperti dikemukakan di atas yaitu: (1) keterbatasan modal usaha tani, (2) kelemahan fungsi penyediaan *input*, (3) kinerja kelompok tani tidak optimal, (4) berkembangnya resistensi hama, dan (5) penyuluhan yang tidak efektif.

Selain untuk menghantarkan teknologi, kegiatan PTT tahun 2004 berupaya untuk: mengenali perilaku dan respon petani, memahami kondisi dan birokrasi fungsi penyuluhan, mempelajari aturan-aturan dalam pengembangan kapas dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dalam penerapan teknologi. Kegiatan PTT tahun 2005 dimodifikasi dengan memilih petani peserta berdasarkan tingkat kerja sama tahun 2004, membentuk dan membina kelompok tani serta menggerakkan kemandirian kelompok.

PTT menyediakan modal awal untuk mengatasi keterbatasan modal petani, sehingga petani bisa mempersiapkan lahan dan bertanam sesuai dengan rekomendasi waktu tanam, penyediaan benih dan saprodi sebelum waktu tanam dan pemupukan. Modal awal dan saprodi tersebut harus dikembalikan ke kelompok tani untuk dijadikan modal kelompok pada kegiatan PTT tahun 2005. Dengan demikian pada PTT 2005, Badan Litbang Pertanian hanya menyediakan anggaran untuk benih, membina kelompok tani, dan membangun kerja sama dengan penyuluh-penyuluh di daerah lokasi PTT.

Berbeda dengan petani jagung yang memperoleh kredit ketahanan pangan, petani kapas sulit memperoleh kredit. Pengajuan kredit makin sulit karena petani tidak memiliki agunan (umumnya diminta sertifikat tanah). Kredit melalui perusahaan pengelola kapas dalam bentuk saprodi umumnya terlambat dan jumlahnya tidak mencukupi. Petani memang boros dalam menggunakan benih karena

trauma dengan pengalaman sebelumnya yang menggunakan benih kapas berkabu. Kebiasaan menghambur pupuk tanpa ditutup tanah merupakan salah satu penyebab tidak efisiennya pemupukan. Anjuran untuk memanfaatkan serasah dari sisa-sisa bahan tanaman untuk memelihara kelembapan tanah dan membangun populasi musuh alami ditolak karena petani khawatir serasah tersebut menjadi sarang tikus dan keong yang akan memakan tanaman. Sebagian petani cenderung untuk cepat menggunakan pestisida begitu melihat serangga hama pada tanaman. Pedagang-pedagang pestisida ikut mengintervensi petani yang sedang dibina agar penjualan pestisidanya tidak berkurang. Penyuluh lapangan jarang ditemukan bersama petani kapas.

Contoh-contoh di atas adalah sebagian kecil dari gambaran situasi di lapang yang telah menyebabkan rendahnya produktivitas kapas. Gambaran itu juga dapat dipakai untuk mengukur bagaimana pengorganisasian pengembangan kapas dan tidak efektifnya sistem penyuluhan. Selama tahun 2004, para peneliti PTT bersama penyuluh yang terlibat berupaya membina dan memperbaiki kondisi di atas dengan pendekatan individu dan kelompok, di rumah dan di lapang, siang maupun malam.

Keragaan hasil teknologi tahun 2004 dengan kondisi dan tantangan di atas sungguh mengecewakan, dan baru dirasakan di tahun 2005. Ukuran yang dipakai adalah tingkat produktivitas dan pendapatan usaha tani (Tabel 1).

Walaupun terjadi kekeringan yang panjang di Sulawesi Selatan pada tahun 2004, 34% dan 32% petani PTT masing-masing di Bantaeng dan Bulukumba, mampu mencapai tingkat produktivitas di atas 1 ton/ha; 17% di Bantaeng dan 8% di Bulukumba adalah individu-individu “*early adopters*” yang mampu mencapai produktivitas di atas 1,5 ton/ha. Secara umum terjadi peningkatan produktivitas 25–64%.

Tabel 1. Peningkatan produktivitas petani PTT dibandingkan petani non-PTT tahun 2004

Kabupaten	Petani PTT			Petani non PTT			Peningkatan produktivitas petani PTT
	Produktivitas		Setara kapas	Produktivitas		Setara kapas	
	Kapas	Palawija		Kapas	Palawija		
	kg/ha			kg/ha			
1. Bantaeng	808	824	1 240	457	645	794	56,2
2. Bulukumba	742	381	942	414	306	574	64,1
3. Sinjai	723	306	883	-	1 346	705	25,2
4. Lombok Barat	1 107	434	1 499	-	1 025	927	61,7

Keterangan: Palawija adalah jagung II di Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, kacang tanah di Lombok Barat. Lahan tadah hujan di Sulsel, lahan beririgasi terbatas di Lombok Barat

Tabel 2. Peningkatan produktivitas petani PTT dibandingkan petani non-PTT tahun 2005

Kabupaten	Petani PTT			Petani non PTT		
	Produktivitas		Pendapatan atas biaya total	Produktivitas		Pendapatan atas biaya total
	Kapas	Palawija		Kapas	Palawija	
	kg/ha		Rp	kg/ha		Rp
1. Bantaeng	1 483	911	2 079 835	826	562	1 120 451
2. Bulukumba	1 638	538	2 226 508	794	341	310 325
3. Sinjai	1 263	563	1 370 511	-	1 077	44 860

Tabel 3. Tingkat adopsi teknologi dan produktivitas kapas PTT pada musim tanam 2004 dan 2005

Kabupaten	Tingkat adopsi teknologi (%)		Produktivitas (kg/ha)*	
	2004	2005	2004	2005
Bantaeng	59,8	75,9	1240	1 926
Bulukumba	61,7	70,8	942	1 661
Sinjai	67,3	75,2	883	1 506

* Produktivitas setara kapas

Walaupun penerapan teknologi belum mampu menghasilkan lonjakan produktivitas, teknologi yang direkomendasikan berhasil mengurangi risiko kegagalan dan peningkatan pendapatan usaha tani. Hubungan tingkat adopsi teknologi dan produktivitas yang dicapai dikemukakan pada Tabel 3. Walaupun bimbingan teknologi yang diberikan pada tahun 2005 kurang intensif, peningkatan hasil cukup tinggi, dan yang lebih penting lagi kemandirian kelompok tani mulai tumbuh.

Dari ketiga tabel di atas jelas bahwa bimbingan yang intensif kepada petani menaikkan tingkat adopsi teknologi dan secara langsung me-

ningkatkan produktivitas dan yang menarik, adalah permintaan petani agar mereka jangan ditinggalkan oleh Tim PTT pada musim tanam 2006. Hanya saja tingkat pendapatan yang diperoleh belum menggiurkan petani sehingga perlu perbaikan sistem dan kebijakan-kebijakan yang akan dijelaskan pada bagian lain pada makalah ini.

SISTEM PERBENIHAN

Selain masalah-masalah di tingkat mikro yang dikemukakan di atas, pengembangan kapas

dan rami tidak terlepas dari beberapa masalah makro sebagai berikut: (1) lemahnya sistem perbenihan (terjadi pada hampir semua komoditas perkebunan), (2) lemahnya keterkaitan antar subsistem agribisnis dari hulu-hilir, (3) produk hasil perkebunan dalam bentuk komoditas primer.

Pengembangan kapas dan rami sudah dilaksanakan berkali-kali sejak pemerintah Belanda sampai pemerintah Indonesia sekarang. Tercatatlah dalam sejarah impor varietas-varietas kapas dari mancanegara dan dicoba dikembangkan di berbagai daerah dengan bantuan asing atau melalui proyek-proyek, misalnya ILACO dari negeri Belanda, Proyek Kapas Nusa Tenggara dan lain-lain. Demikian juga dengan rami, dimulai tahun 1911 di Palembang oleh pemerintah Belanda, kemudian di Pematang Siantar, Pemda Jawa Barat, Kopserindo, dan PT Agrina Prima di Wonosobo dan sekarang oleh koperasi yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Sejarah juga menyatakan bahwa usaha-usaha tersebut mengalami kegagalan karena tidak berkembang, dan tidak berhasil menyediakan serat di dalam negeri untuk industri tekstil. Kegagalan penggunaan varietas-varietas impor pada kapas (termasuk kegagalan pengembangan kapas transgenik di Sulawesi Selatan 2001–2002) adalah karena mengabaikan faktor interaksi $G \times E$ (genotipe \times lingkungan) yang sangat kuat pada kapas. Oleh karena itu harus dikembangkan varietas yang sesuai dengan lingkungan tadah hujan, toleran terhadap kompleks hama dan penyakit dan adaptif pada berbagai model pola tanam.

Demikian juga pada rami; faktor bahan tanaman, lokasi, dan budi daya yang tidak sesuai serta teknik pascapanen yang kurang baik menghasilkan serat rami yang berkualitas rendah dan tidak diterima pasar. Walaupun sudah dihasilkan beberapa varietas unggul seperti Pujon 10, Bandung A, dan Seikei Seishin, tanpa benih (bibit) dan teknik

budi daya yang benar sulit dicapai peningkatan produktivitas dan mutu serat rami yang baik.

Varietas-varietas kapas dirakit untuk memperbaiki kesalahan strategi dan asumsi yang dipakai pada permulaan IKR yaitu, pengendalian hama dengan insektisida berdasarkan sistem kalender. Akibatnya pemakaian insektisida mencapai 12–15 l/ha, dan ini harus dikurangi karena akan menimbulkan banyak masalah. Untuk itulah dirakit varietas-varietas Kanesia yang tahan terhadap hama *Amrasca biguttula*, sehingga pemakaian insektisida dapat dikurangi sejak awal dan teknik-teknik pengendalian hama terpadu bisa diterapkan.

Sampai sekarang sudah dilepas 9 varietas Kanesia dan 2 varietas introduksi. Tingkat produktivitas varietas-varietas tersebut 2,0–2,5 ton/ha dengan kualitas serat sesuai untuk benang 30's dan 40's. Peningkatan yang dicapai adalah "gradual" sebab tidak mudah mengakumulasi gen (*gene pyramiding*) ke dalam satu varietas untuk lahan tadah hujan yang memiliki sifat produktivitas tinggi, tahan terhadap kompleks hama dan mutu serat memenuhi keinginan industri dan sesuai untuk lahan tadah hujan.

Setelah varietas unggul kapas dan rami dihasilkan, masih ada proses yang harus dilalui yaitu proses penangkaran benih. Tahap ini sangat menentukan karena batas atas produktivitas yang akan dicapai dan efisiensi pemberian input sangat tergantung pada mutu benih yang digunakan dan tindakan-tindakan budi daya yang diterapkan. Akan tetapi justru penangkaran benih ini yang ditangani seadanya, sehingga benih yang digunakan dalam pengembangan kapas dan rami umumnya tidak lulus dalam sertifikasi benih.

Berbagai upaya dan kesepakatan telah dilakukan dalam memproduksi dan mengolah benih untuk mencapai standar mutu benih yang sudah ditetapkan. Upaya ini selalu dikembalikan pada hubungan yang selalu diperdebatkan: harga benih – tingkat produktivitas kapas – nilai jual hasil kapas.

Padahal semua tahu bahwa penggunaan benih bermutu adalah salah satu syarat untuk meningkatkan produktivitas dan mutu serat yang otomatis berdampak pada harga produk. Kalau hubungan tersebut tidak tercapai, berarti ada kesalahan dalam sistem dan justru kesalahan tersebut tidak pernah diselesaikan; sebaliknya suara di belakang layar cenderung untuk menggunakan kembali benih berserat (*fuzzy seeds*).

Berbeda dengan benih kelapa sawit yang telah menjadi barang komersial, pengadaannya telah menarik minat pebisnis swasta sehingga berkembanglah industri benih sawit tanpa banyak campur tangan pemerintah. Di negara-negara produsen utama kapas, benih kapas juga sudah menjadi barang komersial; tetapi di Indonesia, benih kapas (dan benih banyak tanaman perkebunan lainnya) masih berstatus barang publik, dimana peran pemerintah dalam memproduksi benih sangat diperlukan. Jadi kalau benar-benar berkeinginan mengembangkan kapas dan rami, pengadaan benih seharusnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pengalaman selama 25 tahun menunjukkan bahwa pengadaan benih tidak bisa dilakukan secara parsial, berbasis keproyekan atau menggunakan model-model yang tidak terstruktur dengan jelas agar penyediaan benih berlanjut, dan tidak menimbulkan keributan pada setiap musim tanam. Saat ini sedang dipersiapkan konsep reformasi sistem perbenihan lingkup Departemen Pertanian dan berikut ini dikemukakan konsep struktur industri benih yang bisa disempurnakan.

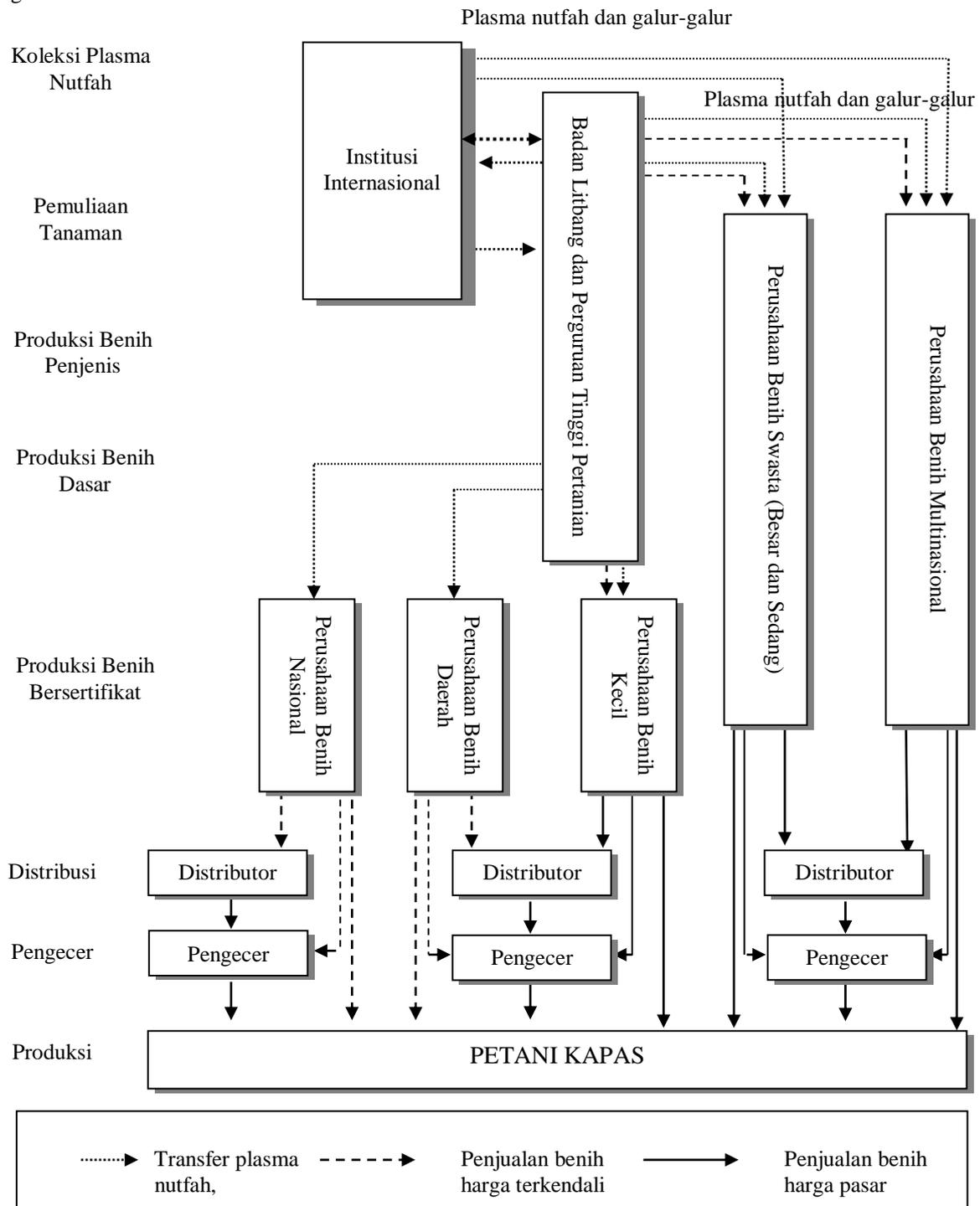
Ide awal dari struktur ini diperoleh sewaktu melakukan *scientific exchange* masalah kapas ke India pada bulan Februari 2005 yang lalu. Struktur sistem perbenihan di India melibatkan seluruh potensi yang ada mulai Badan Litbang; perguruan tinggi pertanian; perusahaan benih pemerintah pusat dan daerah; perusahaan benih swasta besar, sedang, dan kecil; dan perusahaan multinasional

sampai ke distributor benih dan petani dalam pengadaan benih, dengan pembagian fungsi dan aturan main yang jelas. Struktur tersebut direplikasi dengan menempatkan institusi-institusi yang ada atau perlu dibentuk di masa yang akan datang untuk diaplikasikan di Indonesia (Gambar 1).

Dari skema tersebut Badan Litbang Pertanian mendistribusikan benih dasar ke penangkar benih nasional dan perusahaan benih daerah (keduanya perlu dibentuk) dan perusahaan swasta besar, sedang, dan kecil, dengan harga benih terkendali; penyediaan benih ke perusahaan swasta besar dan perusahaan multinasional juga dapat dilakukan dengan pembagian royalti yang jelas. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi benih untuk didistribusikan kepada distributor dan pengecer benih dengan harga terkendali (subsidi), sedangkan perusahaan benih swasta dan multinasional mengambil porsi petani komersial dengan harga benih sesuai harga pasar.

Dimana peran Ditjen Perkebunan, Dinas Perkebunan, BP2MB, dan lain-lain dalam sistem ini? Institusi-institusi tersebut tetap berperan, bersinergi, berinteraksi dalam struktur tersebut di atas. Misalnya BP2MB dalam pengawasan benih bersertifikat dan dalam produksi benih dasar. Demikian juga Ditjen Perkebunan sebagai fasilitator produksi benih nasional, produksi benih swasta bahkan produksi benih multinasional, sedangkan Dinas Perkebunan membina perusahaan benih daerah, melatih penangkar dan penyuluh benih. Struktur tersebut boleh dikaji atau disempurnakan, namun yang lebih penting dioperasionalkan untuk memperbaiki sistem perbenihan yang tidak jelas sekarang ini. Kajian yang menyeluruh perlu dilakukan mulai dari aspek finansial, regulasi dan perundang-undangan, penyiapan SDM, fasilitas serta infrastruktur, dan lain-lain, agar terbentuk sistem perbenihan yang solid.

Fungsi:



Gambar 1. Model organisasi industri benih kapas dan rami (usulan)

PRODUK OLAHAN PRIMER DAN AGRO-INDUSTRI

Kapas dan rami di Indonesia dikembangkan untuk produksi serat; meskipun sudah diketahui bahwa serat kapas hanya 33–36% dari hasil kapas berbiji sedangkan 64–67% adalah biji kapas yang mengandung minyak 23–25% dan protein 25–27%. Demikian juga rami (*china grass*) hanya 3–4% dari produk biomass sedangkan 90–95% adalah batang dan hijauan yang dapat diproses untuk campuran konsentrat pakan kambing.

Produk utama di atas dianggap sebagai hasil samping dan tidak pernah dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak makan, minyak industri, pakan ternak atau produk industri lainnya. Kita terpaku pada kapas dan rami untuk bahan baku industri primer (tekstil) dan belum melangkah kearah industri sekunder dan industri hilir lainnya. Malaysia maju karena sudah mengembangkan berbagai produk akhir tidak hanya *crude palm oil* (CPO), Filipina sudah memproduksi lebih dari 100 produk kelapa yang masuk ke pasar domestik dan luar negeri; dan Amerika Serikat adalah eksportir minyak kapas dan berbagai minyak industri lainnya.

Selama biji kapas dan hijauan rami tidak dihargai dan dimanfaatkan, kita tidak bisa memberikan harga yang wajar untuk pembelian kapas berbiji, batang basah atau *china-grass* rami, dan usaha tani kapas dan rami tidak akan pernah menarik minat petani, karena tidak sesuai dengan kondisi harga riil di lapangan. Jadi kata kuncinya adalah diversifikasi produk untuk dapat memberikan harga kapas dan *china-grass* yang wajar untuk menarik minat petani dalam pengembangan kedua komoditas ini. Konsekuensinya adalah agribisnis kapas dan rami harus disertai oleh tidak hanya industri pemintalan tetapi juga industri pakan ternak dan industri produk-produk derivatif lainnya. Bagaimana dengan luasan tanaman untuk ketersediaan bahan baku agar dapat dikembangkan industri di

atas? Disinilah diperlukan peran awal pemerintah yang kuat (*strong political-will*) untuk menginisiasi luasan pengembangan kapas dan rami yang memungkinkan pengembangan industri terpadu di atas dengan para pelaku dari swasta, koperasi, asosiasi-asosiasi, perbankan, dan lain-lain dengan fasilitas dan bimbingan pemerintah.

Kondisi yang diinginkan di atas sulit diwujudkan jika pengembangan kapas dan rami dilakukan terpecah-pecah seperti sekarang ini. Kapas dan rami harus dikembangkan di areal yang kompak sesuai dengan daerah kesesuaiannya masing-masing agar biaya produksi, biaya pembinaan dan pengawasan, serta biaya transportasi *feasible*. Sebagai contoh rencana/isu pengembangan kapas di Kabupaten Merauke seluas 400 ribu hektar beberapa tahun lalu dengan mekanisasi akan *feasible* dan terealisasi jika disertai oleh *ginmery*, industri pemintalan, serta industri pengolahan biji kapas. Selain itu pengembangan kedua komoditas ini juga harus mempersiapkan SDM untuk agroindustri hilir, pembangunan sarana-prasarana wilayah yang dikendalikan oleh otoritas tertentu dari "on-farm" sampai "off-farm" dengan sumber pembiayaan yang jelas untuk program terpadu tersebut. Jadi harus melalui "master-plan" yang holistik.

PERMODALAN DAN PENYULUHAN

Seperti telah dikemukakan di atas, permasalahan dalam pembiayaan subsektor perkebunan adalah kurangnya akses petani terhadap sumber daya modal, kurangnya dukungan kebijakan seperti fasilitas kredit atau insentif. Hal ini ditambah lagi dengan tingginya risiko dalam usaha tani kapas, sehingga tidak menarik minat perbankan dalam membantu petani; juga trauma masa lalu dengan banyaknya tunggakan kredit petani tampaknya sulit dilupakan. Jadi walaupun tersedia berbagai sumber pembiayaan dengan berbagai pola penjaminan

serta mekanisme penyaluran, kenyataan di lapangan sungguh berbeda.

KUD dan lembaga keuangan (perbankan) tidak ada di desa lokasi PTT; bahkan tidak di setiap kota kecamatan ada BRI. Petani sangat sedikit yang mau berhubungan dengan bank karena berbelitnya administrasi dan prosedur pinjaman yang harus menggunakan agunan. Perusahaan-perusahaan pengelola kapas di Sulsel dan NTB merupakan lembaga formal yang memberi pinjaman sarana produksi; kemudian membeli kapas berbiji yang dihasilkan petani dengan pemotongan pinjaman.

Sumber pendanaan lain yang banyak dimanfaatkan adalah perorangan dan kios saprodi; pinjaman tersebut dilunasi setelah panen dengan tingkat bunga yang tinggi. Kelompok tani yang ada, tidak mempunyai modal untuk dapat membantu anggotanya. Jenis saprodi, harga pasar, dan tingkat pengembaliannya setelah panen ke kios saprodi dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa bunga pinjaman saprodi selama musim tanam (5 bulan) berkisar 21,1–66,7% (rata-rata 43,1% atau 8,6% per bulan). Tingkat bunga pinjaman di atas sangat tinggi (dibandingkan dengan bunga bank) tetapi prosedurnya mudah, cepat, dan tanpa agunan. Itulah permasalahan berat yang dihadapi oleh petani kapas dan petani-petani lain yang tidak memperoleh fasilitas kredit. Jalan keluarnya sudah ada dengan ke-

luarnya UU No. 13 tahun 2005 tentang Strategi dan Kebijakan Peningkatan Akses Petani terhadap Permodalan, yang menata kepemilikan dan sertifikasi tanah untuk digunakan sebagai agunan memperoleh permodalan dan peningkatan layanan lembaga keuangan pedesaan untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2005 juga dapat digunakan yang berisi Kebijakan Peningkatan Kemampuan Petani dan Nelayan serta Penguatan Lembaga Pendukungnya. Jadi, instrumennya sudah ada, tinggal implementasinya hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Persoalan ini perlu diselesaikan untuk menggerakkan kembali pengembangan kapas dan rami.

Sudah menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian. Pemerintah ingin agar petani diberdayakan dan didorong untuk dapat menjadi petani maju yaitu petani yang menguasai seluk-beluk usaha taninya, memahami proses pascapanen untuk memberi nilai tambah pada produk usaha taninya, dan menguasai informasi pasar komoditas yang diusahakannya.

Sasaran tersebut di atas dicapai melalui proses penyuluhan. Dalam pelaksanaannya, ditempuh pendekatan kelompok yaitu memberikan akses kepada pemuka atau tokoh petani agar dapat memberi keteladanan dalam usaha taninya dengan mengadopsi inovasi-inovasi yang tersedia.

Tabel 4. Jenis saprodi yang dipinjam dan tingkat pengembaliannya (data 2004)

Saprodi	Satuan	Harga/satuan (Rp)	Pengembalian (Rp)	Tingkat bunga (%)
Urea	Sak	52 500	75 000	42,9
ZA	Sak	55 000	75 000	36,4
SP-36	Sak	75 000	104 000	48,6
KCl	Sak	95 000	115 000	21,1
Herbisida	Liter	27 000	45 000	66,7

Teori di atas belum dapat diwujudkan di lapangan. Meskipun kelompok tani kapas sudah terbentuk (di atas kertas), tetapi sebagian besar hanya berfungsi sebagai tempat men"drop" saprodi dan menyalurkan ke anggotanya, dan kembali pada waktu penimbangan hasil. Aktivitas berkelompok, pembinaan kelompok, dan interaksi dengan penyuluh berlangsung dengan intensitas rendah.

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, Menteri Pertanian telah menetapkan struktur dan hubungan kelembagaan penyuluhan pertanian. Kelompok tani dibina oleh PPL yang berada di BPP yang berada di bawah BIPP yang dikaitkan pada salah satu dinas di kabupaten (Gambar 2). Di tingkat kabupaten juga dibentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten yang membina semua penyuluh di kabupaten tersebut.

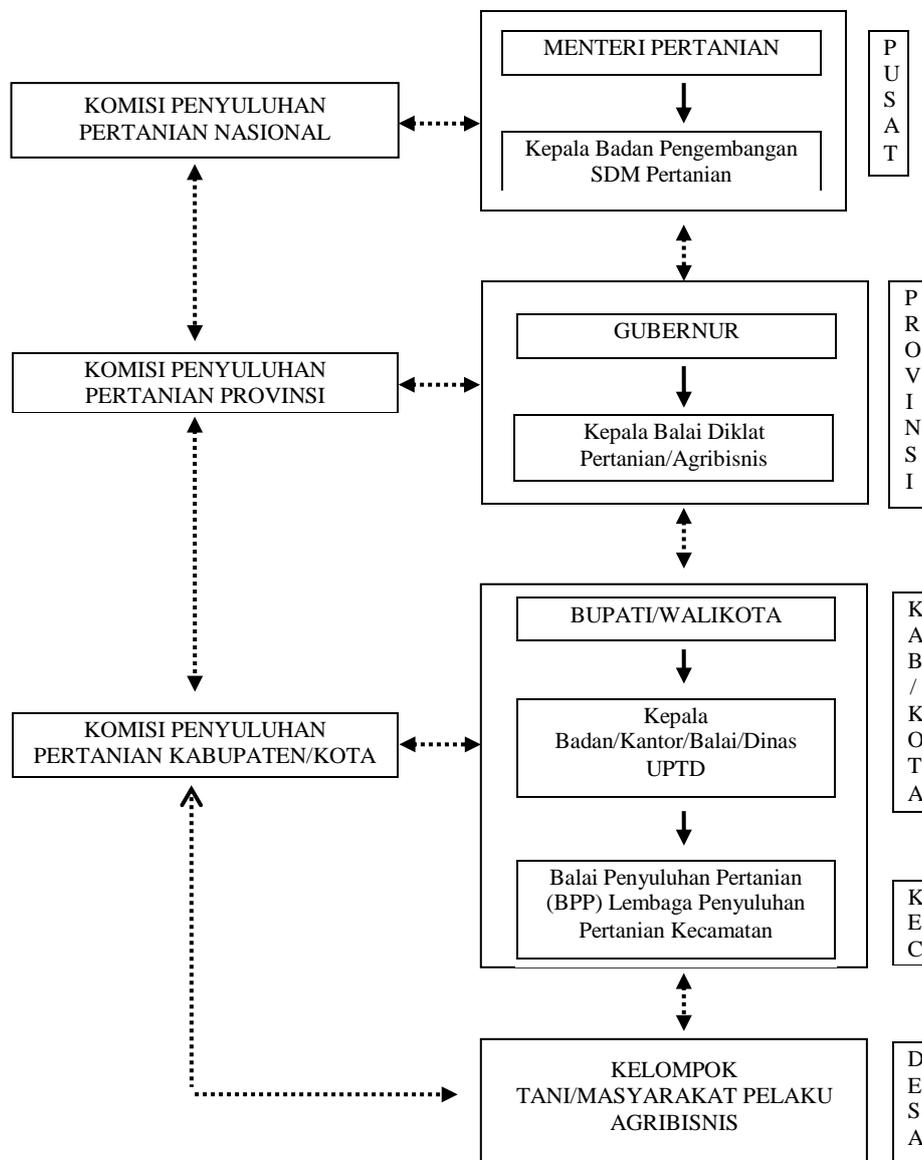
Komisi Penyuluhan Pertanian di kabupaten yang terlibat PTT belum terbentuk, sehingga penyuluh-penyuluh tersebut lebih banyak dibina oleh dinas terkait. Di Kabupaten Bantaeng, BIPPK (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan) berinduk ke Dinas Pertanian dan Hortikultura, demikian juga di Bulukumba. Di Kabupaten Sinjai wadah bagi tenaga penyuluh berada di dinas teknis, sedangkan di Lombok Barat, koordinator penyuluh berada pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP).

Hubungan antara penyuluh dengan dinas teknis dirasakan kurang lancar. Dalam menyusun dan melaksanakan program pengembangan, dinas teknis tidak melibatkan para penyuluh, begitu juga penyuluh tidak berkoordinasi dengan dinas terkait

dalam penyusunan programnya. Dinas teknis tidak melibatkan para penyuluh dengan alasan sudah mempunyai petugas lapang yang difungsikan sebagai penyuluh. Ketidaksesuaian latar belakang keilmuan penyuluh dengan daerah binaannya juga menjadi penyebab tidak efektifnya tenaga penyuluh dan keengganan Dinas/Subdinas Perkebunan memanfaatkan tenaga penyuluh.

Kondisi penyuluh pertanian cukup memprihatinkan karena kurangnya fasilitas dan biaya operasional, sehingga tidak sedikit tenaga penyuluh yang beralih fungsi menjadi tenaga struktural atau bahkan ada yang menjadi distributor sarana produksi. Menurut informasi, pemerintah daerah kurang memperhatikan fasilitas untuk penyuluh karena kegiatan penyuluhan tidak berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Jadi lengkaplah kekalutan yang terjadi di dunia penyuluhan. Penataan sedang dilakukan oleh Badan SDM Pertanian, dan UU tentang Penyuluhan Pertanian Nasional, sebagai payung hukum dari tata laksana kegiatan penyuluhan nasional sudah disetujui oleh DPR. Apapun yang dilakukan, semuanya harus dimulai dari peningkatan mutu SDM pertanian. Dalam hal ini pelatihan penyuluh dan peran P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya) perlu ditingkatkan. BPP-BPP perlu ditingkatkan aktivitasnya dengan demonstrasi-demonstrasi teknologi di wilayah kerjanya. Pertukaran peneliti-penyuluh secara periodik perlu dilakukan untuk mendekatkan peneliti dengan masalah lapang dan penyuluh dengan sumber teknologi.



Gambar 2. Struktur dan hubungan kelembagaan penyuluhan pertanian

BAHAN BACAAN

Hasnam, Nurheru, F.T. Kadarwati, E. Sulistyowati, P.D. Riajaya, Nurindah, dan M. Sahid. 2005. Pengelo-

laan tanaman terpadu pada kapas di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Laporan Hasil Kegiatan tahun 2004. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat. 56 hal.

- Suresh, P. and R. Tripp. 2002. India's seed industry reforms: prospect and issues. *Ind. In. Agric. Econ.* 57(3):443-458.
- Sudjindro. 2006. Pengembangan rami dan permasalahannya. Makalah untuk Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Surabaya 15 Maret 2006. 18 halaman.
- Tim Akselerasi Kapas. 2005. Akselerasi alih teknologi pada kapas di Provinsi Sulawesi Selatan, musim tanam 2005. Laporan Diseminasi Hasil Penelitian (Draft 1). Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang. 40 hal.
- Tohir, W. 2005. Strategi peningkatan kualitas petani. Seminar Nasional Revitalisasi Perkebunan sebagai Langkah Strategi untuk Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. 5 hal.

DISKUSI

1. Dr. Masnama Tadjo (Disbun Sulawesi Selatan)

Pertanyaan/Saran:

- Masalah pokok perkapasan adalah benih, terutama mutu benih yang masih rendah sehingga produktivitas rendah dan harga benih yang relatif mahal.
- Harga kapas dalam negeri relatif murah mengakibatkan daya saing kapas rendah, sehingga masuknya komoditas lain yang lebih kompetitif ke areal kapas sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pengalihan komoditas dari kapas ke tanaman lain tersebut.
- Dihimbau para pengelola untuk bersatu dalam membina petani baik dalam mengatur saprodi, maupun memberi harga hasil kapas agar petani senang menanam kapas. Perlu reformasi untuk pengembangan kapas.

2. Bpk. Heri (PR Sukun)

Pertanyaan:

- Industri tekstil tidak tertarik mengembangkan kapas, cenderung impor karena sebagai penge-

lola dan pengguna tidak ada kemudahan dari pemerintah, di samping itu kesulitan mendapatkan saprodi dan harganya pun di atas harga eceran pemerintah, juga tidak ada bank yang mau mendanai pengembangan kapas. Agar industri tekstil lebih bersemangat mengembangkan kapas, perlu ada perhatian atau kemudahan dari pemerintah.

- Apabila petani kapas menuntut kenaikan harga kapas berbiji, apa yang bisa kami lakukan? Mampukah pengelola membeli kapas petani? Dengan adanya pencabutan subsidi kapas negara maju jangan sampai menyulitkan pengelola.

Jawab:

- Masalah-masalah perkapasan yang ditemukan di lapangan sebaiknya dibawa ke tingkat nasional (*policy maker*), tidak cukup diselesaikan melalui lokakarya karena tidak hanya dengan mengatur pupuk dan saprodi lainnya.
- Kapas dan rami lebih membutuhkan aksi reformasi dibanding revitalisasi karena kalau revitalisasi hanya penguatan yang lemah, sedang reformasi merombak secara keseluruhan, baik itu benih yang amburadul, dsbnya.

3. Ibu Aminah Musaddad (Koppontren Darussalam, Garut)

Pertanyaan/Saran:

- Hendaknya ada sinergi antara departemen dan program departemen dengan cara berkoordinasi dengan para pelaku supaya sesuai dengan kebutuhan di lapang.

Jawab:

- Perlu meningkatkan kerja sama di dalam maupun di luar departemen untuk menetapkan strategi pengembangan kapas dan rami.